

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Siti Soetami. 2011. "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*". Bandung. Refika Aditama.
- Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprati. 2007. "*Manajemen Pegawai Negeri Sipil (suatu pengantar)*". Yogyakarta. LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Burhanudin A. Tayibnapi. 1995. "*Administrasi Kepegawaian suatu tinjauan analitik*". Jakarta. Pradnya Paramita.
- Gatot Supramono. 2013. "*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*". Jakarta. Rineka Cipta.
- Indroharto dalam Ridwan HR. 2018. "*Hukum Administrasi Negara Edisi revisi*". Depok. Rajawali Pers.
- M. Herry Indrawan. 2008. Tesis. "*Pemberian sanksi administrasi disiplin pegawai negeri sipil di Pengadilan tata usaha negara Bandung sebagai upaya pembentukan aparatur yang bersih dan berwibawa*". Semarang. Universitas Diponegoro.
- Miftah Thoha. 1991. "*Prespektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II)*". Jakarta. Rajawali Pers.
- Muchsan. 1982. "*Hukum Kepegawaian Pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil (Suatu Tinjauan dari Segi Yuridis)*". Jakarta. Bina Aksara.
- Muh. Kadarisman. 2018. "*Manajemen Aparatur Sipil Negara*". Depok. Rajawali Pers.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. "*Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*". Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Muri Yusuf. 2017. "*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*". Jakarta. Kencana.
- M. Syamsudin. 2012. "*Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*". Jakarta. Kencana.
- O.C Kaligis. 2002. "*Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*". Bandung. Alumni.

- Philipus M. Hadjon et al. 201. "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Cetakan kedua belas)*". Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Ridwan. 2019. "*Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*". Yogyakarta. FH UII Press.
- Rozali Abdullah. 2002. "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*". Jakarta. Rajawali Pers.
- Sadjijono. 2011. "*Bab-bab Pokok Hukum Adminitrasi*". Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Soerjono Soekanto. 2013. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*". Jakarta. Rajawali Pers.
- S.F.Marbun. 2015. "*Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*". Yogyakarta. FH UII Press.
- Syaiful Bakhri. 2018. "*Dinamika Hukum Pembuktian*". Depok. Rajawali Pers.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. "*Hukum Kepegawaian di Indonesia edisi kedua*". Jakarta. Sinar Grafika.
- Sosialisasi Hasil Diklat Sengketa TUN dan Sengketa ASN Pasca berlakunya Perma No 6 Tahun 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
- Teguh Satya Bhakti. 2017. "*Pembangunan Hukum Administrasi Negara melalui putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara*". Jakarta. Puslibang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Wicipto Setiadi. 2001. "*Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*". Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. "*Kamus Hukum*". Semarang. Aneka Ilmu.
- Zairin Harahap. 1997. "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*". Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2018. "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*". Bandung. Pustaka Setia.

Jurnal

- Adang Budiman et al. 2012. "Rationalizing Ideologies, Social Identities and Corruption Among Civil Servants in Indonesia During the Suharto era". *Journal of business ethics*, Volume 116 Nomor 1 Januari.
- Anjas Yanasmoro dan I Nengah. 2018. "Kajian hukum sistem pembuktian dalam peradilan tata usaha negara". *WICAKSANA. Jurnal Lingkungan & Pembangunan* Volume 2 Nomor 2 Septemeber.
- Enrico Simanjuntak. 2014. "Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pelaksanaan eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara". *JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 3 Nomor 2 Juli.
- Jing liu. 2019. "Research on the performance appraisal of civil servants in the era of big data". *Journal Advances in Economics, Business and management research* Volume 80 Nomor 1 Oktober.
- Ladju Kusmawardi et.al. 2018. "Penerapan Sanksi Administratif dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang". *Jurnal Law Reform* Volume 14 Nomor 1 Desember.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. 2019. "Lawsuit in administrative court after administrative proceedings based on Perma No. 6 OF 2018". *JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 8 Nomor 3 November.
- Putera Astomo. 2014. "Eksistensi Peradilan administrasi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Yuridis* Volume 1 No 1 Maret.
- Saartje Sarah Alfons. 2018. "Konsekuensi Yuridis Terhadap Diabaikannya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap". *Jurnal SASI* Volume 24 Nomor 2 Juli.
- Willy Riawan Tjandra. 2011. "Dinamika keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara". Yogyakarta. *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus* Volume 1 No. 1 Maret.
- Yodi Martono Wahyunadi. 2016. "Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 5 Nomor 1 Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil.

Internet

Badan Kepegawaian Daerah. <http://bkd.jogjaprovo.go.id/statistik>. Diunduh pada hari Senin, 30 Oktober 2019 jam 19.00 WIB.

Black's Law Dictionary. Diunduh pada hari Senin, 2 Desember 2019 jam 19.00 WIB.

Dwi Haryati. 2019. "Perluasan Kewenangan PTUN". Yogyakarta. Kanal Pengetahuan FH UGM. <https://bit.ly/2OZTKZI>. Diunduh pada tanggal 8 Desember 2019. Pukul 14.10 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/>. Diunduh pada tanggal 8 Desember 2019. Pukul 05.38 WIB.

Sovia Hasanah. 2016. "Alur Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara". <https://bit.ly/2LOjy9x>. Diunduh pada tanggal 8 Desember 2019. Pukul 17.18 WIB.